

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Inspektorat DKI Jakarta

Rahmatika M. Arsyad*, Johan Arifin

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Alamat Email koresponden: rarsyad8@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membangun model konseptual terhadap beberapa faktor potensial yang dapat mempengaruhi pencegahan tindak korupsi pada suatu lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran komitmen profesional dan komitmen independensi sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi dalam pencegahan tindak korupsi di organisasi pemerintahan khususnya Inspektorat DKI Jakarta.

Keywords: *Whistleblowing System*, Pengendalian Internal, *Good Governance*, Pencegahan Tindak Korupsi, Komitmen Profesional, Komitmen Independensi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sektor swasta. Oleh karena itu, pencegahan tindak korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Seperti yang dinyatakan oleh Widyawati et al., (2019), pencegahan tindak korupsi merupakan upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab tindak korupsi.

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam pencegahan korupsi adalah penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system*. Sistem ini memberikan saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan tanpa takut akan pembalasan.

Pengendalian internal yang kuat juga berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Pengendalian internal yang lemah dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Selain itu, praktik tata kelola yang baik juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. *Good governance* dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan memastikan bahwa semua proses dan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (Purba & Huda, 2022).

Komitmen profesional dan komitmen independensi saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas auditor. Keduanya berkontribusi pada pencegahan tindak korupsi. Auditor yang berkomitmen secara profesional dan independen lebih mungkin untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan korupsi, serta mendorong penerapan *whistleblowing system* yang efektif.

Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan audit di sektor publik. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya publik dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga penelitian ini berfokus pada institusi yang memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan tindak korupsi (Pramudyastuti et al., 2021).

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang unik. Merujuk pada data pemetaan kasus korupsi tahun 2022, provinsi DKI Jakarta menduduki

peringkat kelima kasus korupsi terendah di Indonesia, terdapat 8 total kasus dengan jumlah kerugian mencapai delapan ratus enam puluh tujuh triliun rupiah. Pemilihan Inspektorat DKI Jakarta dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang kompleks ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance* terhadap pencegahan tindak korupsi. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji peran komitmen profesional dan komitmen independensi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan pencegahan tindak korupsi.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Prosocial Organizational Behavior Theory

Prosocial Organizational Behavior Theory mendefinisikan perilaku prososial sebagai tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi itu sendiri (Brief & Motowidlo, 1986). Dalam konteks penelitian ini, tindakan *whistleblowing* dianggap sebagai bentuk perilaku prososial karena bertujuan untuk melaporkan tindakan kecurangan atau penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.

Penelitian ini menganggap bahwa seorang *whistleblower* berperan dalam menegakkan etika dan integritas organisasi. Dengan melaporkan tindakan yang tidak etis atau *illegal*, individu tersebut berkontribusi pada kesejahteraan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan dimana ini menunjukkan bahwa tindakan *whistleblowing* bukan hanya sekedar pelaporan, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi dan memperbaiki organisasi.

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory dikemukakan oleh Cressey (1953) yang mengidentifikasi tiga elemen utama yang dapat menyebabkan kecurangan diantaranya: (1) Tekanan, yaitu faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, seperti keserakahan atau tekanan finansial; (2) Peluang, yaitu kondisi memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan, seringkali disebabkan oleh kelemahan dalam pengendalian internal; (3) Rasionalisasi, yaitu proses mental dimana individu membenarkan tindakan curang mereka, sehingga mereka merasa tidak bersalah.

Dalam penelitian ini, pengendalian internal dipilih sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pencegahan tindak korupsi. Dengan menggunakan *Fraud Triangle Theory*, dapat menganalisis bagaimana pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan, sehingga mengurangi risiko terjadinya korupsi.

Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik *good governance* dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan dan peluang untuk melakukan kecurangan.

Theory of Attitude & Behavior

Theory of Attitude & Behavior menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi dari keinginan atau minat yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, kebiasaan, dan konsekuensi yang ada. Dalam konteks penelitian ini, sikap auditor terhadap *whistleblowing* dan pencegahan korupsi menjadi fokus utama.

Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen profesional dan komitmen independensi sebagai faktor yang mempengaruhi sikap auditor. Sikap profesional yang baik dapat meningkatkan keinginan auditor untuk melaporkan tindakan kecurangan, sementara independensi auditor sangat penting untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam audit.

Dengan menggunakan teori ini, dapat mengeksplorasi bagaimana sikap positif terhadap *whistleblowing* dapat mendorong auditor untuk mengambil tindakan melaporkan kecurangan. Jika auditor memiliki sikap yang mendukung praktik *whistleblowing*, mereka lebih mungkin untuk melaporkan tindakan yang tidak etis.

Pencegahan Tindak Korupsi

Tindak korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi, yang dapat mencakup penggelapan, suap, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan. Korupsi dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi (Okafor et al., 2020). Pencegahan tindak korupsi bertujuan untuk (1) mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya; (3) menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi; (4) mendorong perilaku etis di kalangan pegawai dan pemangku kepentingan.

Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam organisasi, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian lebih lanjut (Shawver & Shawver, 2018). *Whistleblowing system* berfungsi sebagai saluran untuk meningkatkan transparansi dalam organisasi, mendorong pegawai untuk melaporkan tindakan yang tidak etis tanpa takut akan pembalasan, dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan (Nugroho & Afifi, 2022). Pengendalian internal berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sumber daya, mendeteksi kesalahan dan kecurangan secara dini, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.

Good Governance

Good Governance adalah seperangkat aturan dan praktik yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Damayanti & Primastiwi, 2021). Peran *good governance* yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Komitmen Profesional

Komitmen profesional merujuk pada tingkat keterikatan emosional individu terhadap profesinya, yang mencakup penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan profesi serta keinginan untuk membantu profesi mencapai tujuan tersebut (Kusumastuti, 2022). Komitmen profesional berfungsi untuk meningkatkan motivasi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, mendorong individu untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis, dan memperkuat integritas dan etika dalam praktik profesional.

Komitmen Independensi

Komitmen independensi merujuk pada tanggung jawab profesional auditor untuk bertindak secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, sesuai dengan kode etik profesi (Mansor et al., 2020). Peran dari komitmen independensi yaitu untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit, mendorong auditor untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis tanpa rasa takut akan konsekuensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil audit dan laporan keuangan.

MODEL PENELITIAN

Dari ketiga teori tersebut dapat diusulkan beberapa variabel potensial yang diduga dapat mempengaruhi pencegahan tindak korupsi diantaranya *Whistleblowing System*, Pengendalian Internal,

Good Governance, Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi yang memoderasi variabel *Whistleblowing System*.

Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Whistleblowing System berfungsi sebagai saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Pengungkapan informasi ini diharapkan dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh negara atau masyarakat (Islamiyah et al., 2020). *Whistleblowing system* merupakan alat yang dinilai efektif dalam pencegahan tindak korupsi. Dengan memberikan saluran yang aman untuk pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mendorong budaya etis. Sistem ini dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan integritas. Semakin tinggi pegawai atau pihak yang bersangkutan melakukan tindakan *whistleblowing*, maka hal ini dapat menekan dan mencegah terjadinya korupsi. Teori ini didukung oleh penelitian Hakim et al. (2017), Marliza (2018), Endarningtyas & Chariri (2022), Paramitha (2017), Wardah et al. (2022), dan Islamiyah et al. (2020).

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku (Larasati et al., 2017). Pengendalian internal melibatkan proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap aktivitas organisasi sehingga tindakan kecurangan dapat terdeteksi lebih awal. Jika pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik maka pengendalian internal dapat diandalkan dalam mencegah tindak korupsi. Teori ini didukung oleh penelitian Kurniawan & Izzaty (2019), Farochi & Nugroho (2022), Jannah (2016), dan Ulum & Suryatimur (2022).

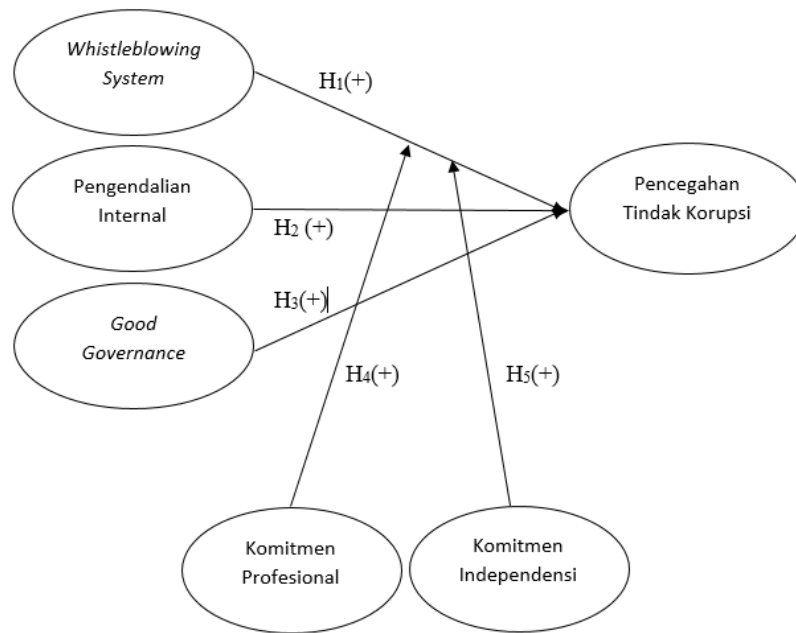
Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Tindak Korupsi

Good governance berperan penting dalam pencegahan tindak korupsi. Praktik tata kelola yang baik dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan organisasi apabila perusahaan menerapkan *good governance*. Teori ini didukung oleh beberapa penelitian diantaranya Jannah (2016), Kurniawan & Izzaty (2019), dan Hambali et al. (2023).

Pengaruh Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi sebagai Variabel Moderasi dalam Pencegahan Tindak Korupsi

Komitmen Profesional dan Komitmen Independensi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel yang memoderasi variabel *whistleblowing system*. Sikap profesional auditor dapat mempengaruhi efektivitas *whistleblowing system* dalam mencegah tindak korupsi. Komitmen profesional yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Independensi auditor sangat penting untuk menjaga integritas dan objektivitas dalam audit. Komitmen independensi dapat memperkuat hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan tindak korupsi.

Dengan meningkatkan komitmen profesional dan komitmen independensi, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Teori ini didukung oleh Dewi & Dewi (2019), Hailah et al. (2021), Chairi et al. (2022), Badrulhuda et al. (2021).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel independen (*whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance*) terhadap variabel dependen (pencegahan tindak korupsi). Selain itu, komitmen profesional dan komitmen independensi berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel *whistleblowing system* dengan pencegahan tindak korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dalam bentuk model konseptual yang merupakan representasi visual atau diagramatik yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Proses dalam penyusunan model penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk merancang dan mengembangkan model yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya:

Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi isu utama yang ingin ditangani, yaitu pencegahan tindak korupsi. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada, mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada, dan menentukan relevansi masalah tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Penentuan Variabel Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi pencegahan tindak korupsi, yaitu *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance*. Selain itu, komitmen profesional dan komitmen independensi diusulkan sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang relevan, seperti auditor dan pegawai di lembaga pemerintah yaitu Inspektorat DKI Jakarta. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Analisis Data

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan kompleks antara variabel-variabel yang diteliti.

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Pada tahap ini dilakukan kajian literatur untuk mengumpulkan teori-teori yang relevan, seperti *Prosocial Organizational Behavior Theory*, *Fraud Triangle Theory*, dan *Theory of Attitude & Behavior*. Ini membantu dalam memahami konteks dan dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian.

Pengembangan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk menunjukkan hubungan positif antara variabel independen (*whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance*) dengan variabel dependen (pencegahan tindak korupsi). Variabel moderasi (komitmen profesional dan independensi) juga diintegrasikan dalam model ini untuk memperkuat atau memperlemah hubungan yang ada.

Proses ini menciptakan sebuah model penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran di lembaga pemerintah terhadap pencegahan tindak korupsi.

KESIMPULAN

Pencegahan tindak korupsi merupakan upaya yang sangat penting dan harus dilakukan secara terintegrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan *good governance* memiliki pengaruh terhadap pencegahan tindak korupsi. *Whistleblowing system* memberikan saluran bagi individu untuk melaporkan tindakan kecurangan, sementara pengendalian internal yang efektif berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. *Good governance* menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, yang dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Komitmen profesional dan komitmen independensi berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan tindak korupsi. Tingkat komitmen yang tinggi dari auditor terhadap profesionalisme dan independensi mereka sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pelaporan dan menjaga integritas dalam audit.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi dari ketiga teori yang digunakan yaitu *Prosocial Organizational Behavior*, *Fraud Triangle*, *Attitude & Behavior* diharapkan dapat membentuk sebuah model penelitian yang bermanfaat terhadap pencegahan tindak korupsi. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya di sektor publik untuk memperbaiki dan mengembangkan *whistleblowing system* yang ada, dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan tindak korupsi, dan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan.

REFERENSI

- Badrulhuda, A., Hadiyati, S. N., & Yusup, J. (2021). Komitmen profesional dan sensitivitas etis dalam intensi melakukan whistleblowing. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(4), 522–543.
- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. *The Academy of Management Review*, 11(4), 710.
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwis. (2022). Kompetensi, moralitas dan sistem whistleblowing dalam pencegahan fraud: studi empiris pada organisasi pemerintahan indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "detecting and predicting financial statement fraud: the effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate*

Governance and Firm Performance, 13(1), 53-81.

- Damayanti, A. F., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 232–245.
- Dewi, N. K. A. R., & Dewi, I. G. A. A. P. (2019). Pengaruh profesionalisme, komitmen organisasi dan sensitivitas etika terhadap intensi dalam melakukan whistleblowing: studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 1.
- Endarningtyas, O. D., & Chariri, A. (2022). Apakah sistem pelaporan pelanggaran efektif mencegah korupsi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 74–84.
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 86–92.
- Hailah, Nirwana, & Mangngalla, M. (2021). Pengaruh pemberian reward dan komitmen profesional auditor terhadap niat melakukan whistleblowing. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(1), 54–63.
- Hakim, T. I. R., Subroto, B., & Andayani, W. (2017). Faktor situasional dan demografis sebagai prediktor niat individu untuk melakukan whistleblowing. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(2), 134–142.
- Hambali, R., Sitorus, S. A., Wibowo, T. S., Bakri, A. A., & Sucipto, B. (2023). Fraud Prevention: an Review Through Good Corporate Governance and Individual Morality. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(2), 1–9.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud di bank perkreditan rakyat (studi pada bank perkreditan rakyat di surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 200.
- Kurniawan, P. C., & Izzaty, K. N. (2019). Pengaruh good corporate governance dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 55–60.
- Kusumastuti, R. (2022). *Kinerja kerja auditor: tinjauan melalui kepuasan kerja dan komitmen profesional* (Y. A. Sari (ed.)). Penerbit Adab.
- Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud di dalam proses pengadaan barang dan jasa. *JLAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 43–60.
- Mansor, T. M. T., Ariff, A. M., & Hashim, H. A. (2020). Whistleblowing by auditors: the role of professional commitment and independence commitment. *Managerial Auditing Journal*, 35(8), 1033–1055.
- Marliza, R. (2018). Pengaruh personal cost of reporting, komitmen organisasi, dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap niat melakukan whistleblowing (studi empiris pada organisasi perangkat daerah kota payakumbuh). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–20.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316.

- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(6), 1335–1366.
- Paramitha, N. P. Y. (2017). Pengaruh whistleblowing system, good corporate governance dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa (doctoral dissertation, universitas pendidikan ganesha). *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 1(1), 1–7.
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115.
- Purba, F. N., & Mun'am Syaiful Huda, M. (2022). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3), 138-149.
- Shawver, T. J., & Shawver, T. A. (2018). The impact of moral reasoning on whistleblowing intentions. *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting*, 21(1), 153–168.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran sistem pengendalian internal dan good corporate governance dalam upaya pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340.
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh whistleblowing system, internal control, leadership dan budaya organisasi terhadap fraud prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233–247.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.